

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN
KEBANGSAAN INDONESIA**

(Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Devi Apriani
NPM. 1521020269

Jurusan: Siyasah Syar'iyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN
KEBANGSAAN INDONESIA**

(Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. KH. Muhammad Rusfi, M. Ag.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S. H. I., MA

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang dikenal dengan multikulturalnya dari budaya, suku, agama, kesamaan cita-cita dan perjuangan. Dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, terdapat kesulitan agar bisa selalu rukun dan bersatu, seringkali terjadinya perdebatan hanya karena perbedaan. Pesatnya kemajuan ekonomi dan teknologi serta era keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini khususnya bagi generasi muda. Hal ini pula yang menjadi salah satu lunturnya jati diri bangsa dan wawasan kebangsaan nilai-nilai Pancasila yang mulai dilupakan akibat tidak bisa menyaring informasi dari pengaruh asing. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konsep wawasan kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dan Bagaimana Implementasi dari Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Konsep wawasan kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dan Bagaimana Implementasi dari Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti terjun langsung kelapangan untuk memeriksa objek yang akan diteliti. Metode analisa data yang dilakukan yaitu secara *Kualitatif* yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pengumpulan data yang diperlukan penelitian yaitu menggunakan metode observasi, kemudian metode wawancara dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Provinsi Lampung wawasan kebangsaan adalah bagaimana memahami tentang kenegaraan sistem hukum yang berlaku di Negara, sejarah-sejarah berdirinya Negara, dan perjuangan semua orang dalam menegakan sebuah Negara. Namun demikian, realita dan fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan potensi mudahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Namun di era Reformasi sekarang ini wacana mengenai pendidikan wawasan kebangsaan seperti berjalan di tempat diantara penyebabnya adalah kegagalan rezim Orde Baru dalam menjadikan Pancasila sebagai kekuatan moral dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia dalam konteks memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Imbas dari kegagalan tersebut adalah bahwa Pancasila dianggap sebagai ideologi yang telah usang dan tidak mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa. Maka dari itu, kita sebagai warga Negara Indonesia sepatutnya harus menjaga dan mempertahankan wawasan kebangsaan ini agar tidak terjadinya perpecahan antar suku, dan bangsa.

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Apriani

NIM : 1521020269

Jurusan/Prodi : Siyasa

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Desember 2019

Penulis

Devi Apriani
1521020269



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)

Nama : Devi Apriani

NPM : 1521020269

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. KH. Muhammad Rusfi, M.Ag
NIP 195902151986031004

Abdul Oodiy Zailani, S.H.I., MA
NIP 198206262009011015

Ketua Jurusan

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.A.g., M.H.
NIP. 197111061998032005



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)"** disusun oleh Nama: **Devi Apriani** NPM: **1521020269** Program Studi: **Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag**

Sekretaris : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

Penguji Utama : **Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag**

Penguji I : **Dr. KH. Mohammad Rusfi, M.Ag**

Penguji II : **Abdul Qodir Zaellani, MA**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UNIRADEN Intan Lampung**



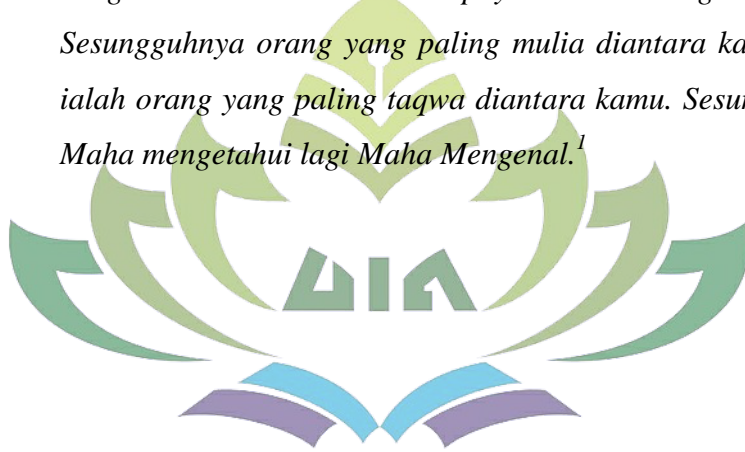
M. H. Kusrudin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹



¹ Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Qur'an surat Al-Hujurat Ayat 13, h. 59.



Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti didalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta, bapak Mursalin dan Ibu tercinta Elliana, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.

2. Kakak ku tercinta Resti Rahayu, terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan kasih sayangnya.
3. Adik-adiku tersayang Rendi Pratama dan Mutiah Fadhila, terimakasih yang selalu memberikan semangat dan senyum yang manis dalam setiap langkahku.
4. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung dan mendo'akan saya.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat ku menuntut Ilmu.



Penulis dilahirkan di Indra Putra Subing, kecamatan terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 21 April 1997 sebagai anak kedua dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Mursalin dan Ibu Elliana.

Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah:

1. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada SDN 01 Indra Putra Subing Lampung Tengah tahun 2004, serta tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2009.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada MTS Miftahul Huda lampung tengah di tahun 2009 dan lulus serta mendapatkan ijazah Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2012.

3. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah atas pada Madrasah Aliyah AN-NUR Lampung tengah di tahun 2012 dan lulus serta mendapatkan ijazah sekolah menengah atas pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan Perkuliahan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.



Assalamualaikum wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) dalam bidang Ilmu syariah. Atas

semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan Persatuan.
2. Bapak Dr. Khairudin Tahmid, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, selaku ketua Jurusan Siyasa yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag Selaku pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Qodir Zaelani, MA Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan Ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.
7. Terimakasih untuk MUI lampung dan Para staf-stafnya yang telah memberikan bantuan dan memberikan izin untuk penelitian.

8. Kekasih tercinta dan tersayang Restu Setia Renaldi yang selalu memberikan waktu luang menemani saat susah maupun senang, senantiasa hadir dan mendo'akan disela-sela kesibukannya.
9. Untuk sahabat-sahabatku, endegeng four wek-wek (mimi gita, mimi resty, mimi anis, mimi devi), bung Dian, Anis, Susan, Kakak Sugeng, Kakak Baim, Kakak Wahidun, adik-adik pramuka ku Mts An-Nur, SD An-nur, kakak-kakak penegak Ambalan Dr. Moeardi dan putri Nurul A'la, Ambalan Ramastika MA AN-NUR, kak uji, ka majid, kak kombet, Guru-guru yang tercinta Semasa SMA, yang selalu menyemangati dan memberikan senyuman manis saat penat itu datang.
10. Untuk sahabat-sahabatku yang tercinta, terbawel, terhebat sekali yang menemani dari awal kuliah hingga sekarang Irma a.m, Khusnul zannah, Meri kurniati, istikhorotus sholehah, dan eli setiawati.
11. Sahabat-sahabat ku Siyasa C, meri, Irma, khusnul, isti, eli, karisma, popi, inayah, ipeh, matang, fitri, reni, delva, ela, permata, adi, teguh, ari, riskur yang telah cukup sabar menemani dan menyemangatiku setiap waktunya.
12. Teman-teman KKN tercinta resty, dina, toyib, regita, dini, novi, rini, tora, amir, fajar kelompok 67 Raden Intan Lampung tahun 2018.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah memberikan Do'a, menyemangati dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Trima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun.
Tidak ada kata lain yang bisa diucapkan selain ucapan trima kasih yang
sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 26 Desember 2019
Penulis

Devi Apriani
1521020269



HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian	10

H. Metode Penelitian.....	11
---------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wawasan Kebangsaan	16
1. Sejarah Wawasan Kebangsaan	16
2. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan.....	31
3. Asas-asas Wawasan Kebangsaan	34
B. Wawasan Kebangsaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	36
1. Pengertian Fiqh Siyasah	36
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	37
3. Wawasan Kebangsaan Dalam Fiqh Siyasah	39
C. Wawasan Kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	45
1. Landasan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia	45
2. Tujuan Bernegara dalam Perspektif UUD 1945 dan Pancasila.....	51
D. Tinjauan Pustaka	53

BAB III HASIL PENELITIAN

A. MUI Lampung	55
1. Sejarah Berdirinya MUI Lampung	55
2. Visi dan Misi MUI Lampung	59
3. Struktur Organisasi MUI Lampung	60
4. Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut MUI Provinsi Lampung	66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung	72
B. Implementasi dari Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dari <i>Fiqh Siyasah</i>	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti, maka perlu adanya penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya agar tidak terjadinya penyimpangan dari judul yang dibahas didalam karya ilmiah ini. Adapun Judul karya ilmiah ini adalah **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Wawasan Kebangsaan Indonesia (Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”**. Jadi, Untuk mengetahui makna pembahasan yang terkandung di dalam judul diatas, maka perlu untuk di uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan” berasal dari kata “tinjau” yaitu pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki suatu masalah.¹
2. Fiqh Siyasah adalah sudut Pandang salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Konsep adalah rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang diluar bahasa digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.

² Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta: Prenademia Group, 2014), h. 3-4.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),h.725.

4. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan Persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴
5. Indonesia adalah
6. Majelis Ulama Indonesia ialah Lembaga Independen yang mewadahi para ulama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, mengayomi umat Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Wawasan Kebangsaan Indonesia (Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung), yaitu Bagaimana cara pandang bangsa Indonesia untuk mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa yang dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya dapat dipertahankan sesuai dengan syariat-syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

⁴ Tati Hartati, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Tentang Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Majalengka”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5 no 1 (Januari-Juni 2012), h. 21.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk proposal antara lain:

1. Alasan Objektif

- a. Kajian tentang Wawasan Kebangsaan masih perlu dibahas karena mendapat respon yang banyak diberbagai kalangan masyarakat, akademis, praktisi maupun aktivis.
- b. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai Konsep Wawasan Kebangsaan Indonesia studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan bagaimana wawasan kebangsaan ditinjau dari fiqh siyasah.

2. Alasan Subyektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang menyusun pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).
- b. Serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Bangsa atau Nation diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan sejarah, kesamaan cita-cita dan perjuangan, kesamaan wilayah tempat tinggal dan pemerintahan, meskipun kemungkinan diantaranya ada perbedaan dalam asal-usul keturunan (ras), keyakinan (agama), maupun bahasa. Paham Nasionalisme modern sekarang mengacu pada pengertian

Nation atau Bangsa seperti yang di kemukakan tersebut, seperti Indonesia yang dalam kebangsaannya terdiri dari beberapa suku, beberapa asal ras, beberapa bahasa daerah, beberapa budaya dan tradisi lokal, tetapi mereka semua menyatakan diri sebagai “Bangsa Indonesia” yang satu kesatuan (*Tunggal Eka*) diatas berbagai macam perbedaan-perbedaan (*Bhenika*).⁵ Persoalan kebangsaan pada hakekatnya adalah hal yang erat kaitannya dengan hasrat yang sangat kuat untuk kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Wawasan kebangsaan itu sangat mutlak untuk di miliki oleh setiap warga Negara Indonesia.

Namun, dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, terdapat kesulitan agar bisa selalu rukun dan bersatu, seringkali terjadi perdebatan hanya karena perbedaan. Arus globalisasi diiringi pesatnya kemajuan Ekonomi dan Teknologi serta era keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini, khususnya bagi generasi anak muda. Selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan efek negatif kepada generasi anak muda yang diakibatkan oleh pesatnya kemajuan. Hal ini pula yang menjadi salah satu lunturnya jati diri bangsa dan wawasan kebangsaan nilai-nilai pancasila yang mulai dilupakan akibat tidak bisa menyaring informasi dari pengaruh budaya asing. Banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam agar bersatu, menjaga persaudaraan dan juga kerjasama dalam kebaikan diantaranya terdapat didalam QS. Al-Hujarat Ayat 13 yang berbunyi:

⁵ Muhammad Tholhah Hasan, “*Ahlusunnah Wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*”, Lantabora Press-Jakarta Indonesia, cet. Ke-tiga 7 ramadhan 1426 H/ 10 Oktober 2005 M, h. 339.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menegaskan bahwa kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal pandangan Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah lah yang dianggap mulia mengapa manusia saling mengolok-ngolok sesama saudara hanya karena Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang berbeda-beda sedangkan Allah menjadikan seperti itu agar manusia saling mengenal dan saling tolong-menolong dan kemaslahatan-maslahatan mereka yang bermacam-macam.

Terdapat satu elemen penting yang termasuk dalam definisi Wawasan Kebangsaan itu yakni dimensi lokalitas di mana bangsa itu bermukim. disini kemudian kita memperkirakan akan terjadi variasi dalam mengkonsepsikan wawasan kebangsaan itu. Boleh jadi masing-masing kelompok masyarakat sesuai dengan sejarah dan pengalamannya sendiri dan memberikan pemahaman berbeda antara satu dengan lainnya mengenai konsep wawasan kebangsaan. Di sini pula perlu ada rambu-rambu umum yaitu bahwa segala konsep wawasan kebangsaan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal

Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disarankan agar segera menyesuaikan diri.⁶

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga indenpenden yang mewadahi para ulama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI berfungsi menampung aspirasi umat dan ormas-ormas Islam setempat, serta menjembatani/mediasi terkait berbagai kepentingan kelompok muslim terhadap pemerintah dan kelompok non muslim. MUI juga aktif dalam upaya pencarian solusi berbagai masalah sosial keagamaan yang muncul dalam masyarakat.⁷

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zauma dan cendikiawan muslim. Misi dari MUI yaitu menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan alam sebagai panutan, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *aqidah Islamiyah* serta menjalankan *syari'ah Islamiyah*; melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *ahlak karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas (*Khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan; mengembangkan *ukhuwah islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah NKRI.⁸

⁶Asnawati, "Mereka membicarakan wawasan Kebangsaan", Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340, h. x.

⁷<https://duajurai.co/2016/05/23/pemprov-lampung-gelar-seminar-dan-lokakarya-wawasan-kebangsaan-di-balai-keratun>, diakses pada hari kamis 22 agustus 2019 jam 14.19 WIB.

⁸<http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/>, diakses Tanggal 18 September 2019.

Wawasan Kebangsaan itu yang akan menyadarkan semua warga Negara akan pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan status dan hak di muka undang-undang yang akan menjamin ketentraman hidup seluruh bangsa.⁹ Oleh karenanya setiap kader dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif, tidak hanya paham namun juga harus diinternalisasi dan diamalkan di setiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi.¹⁰

Lemahnya sikap nasionalisme juga berdampak pada melemahnya Institusi Negara sehingga sangat logis jika wawasan kebangsaan para kader-kader Ormas Islam organisasi Dakwah melemah maka akan berdampak pada melemahnya Institusi Negara.¹¹ Jika institusi Negara melemah, maka dapat disimpulkan bahwa Negara tersebut akan mudah bercerai-berai sekaligus lemah dihadapan Negara-negara lain. Sebaliknya jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai dengan wawasan keislaman maka secara otomatis organisasi dakwah tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Konsep Wawasan Kebangsaan Indonesia (Studi Analisis**

⁹ Anand Krishna, “Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal dan Semangat Kebangsaan”, Jurnal Edukasi; Mencintai Edisi Seabad Kebangkitan Nasional, (Semarang: Edukasi Volume V, 2008), h.13.

¹⁰ Einar M. Sitampul, NU, “Asas Tunggal Pancasila dan Komitmen Kebangsaan; Refleksi Kiprah NU Pasca Khittah 26”, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 101.

¹¹ Ismail SM, “Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem”, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), h. 22.

¹² Silebram Mel, “Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif”, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2005), h. 223.

Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Fokus penelitian pada penelitian ini mengarah kepada Analisis Konsep Wawasan Kebangsaan menurut Pendapatnya Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung. Kemudian, Implementasi dari Konsep wawasan kebangsaan menurut Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinis Lampung ditinjau dari Fiqh Siyash.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mempermudah pembahasan maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1

1. Bagaimana Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Implementasi dari Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ditinjau Dari *Fiqh Siyasa*h?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai atau sesuatu yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Wawasan Kebangsaan Menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Konsep Wawasan Kebangsaan menurut Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

G. Signifikasi/manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan Seandainya dalam penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. secara teoritis yaitu sebagai sumbangan pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang terkait dalam pembahasan dalam skripsi ini.
- b. Secara praktis yaitu bagi penulis yaitu penelitian ini dapat menambahkan wawasan kepada penulis terkait dengan Konsep Wawasan Kebangsaan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Rdaen Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik. Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang di maksud metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara

yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.¹⁴

Deskriptif yaitu metode yang bertumpu kepada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁵

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai bahan yang sesuai dengan pokok

¹³ Susiadi, "*Metodologi Penelitian*", (Bandar Lampung, pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.10.

¹⁴ M. Nasir "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

¹⁵ Rosady Ruslan, "*Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29.

pembahasan dengan judul yang akan diteliti. Kemudian, akan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis. Data sekunder menurut Abdulrahman fathoni adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data tersebut merupakan data obyektif yang ada di lapangan dan tentunya sangat penting untuk menunjang hasil penelitian.¹⁶ Penulis akan mengumpulkan bahan serta dokumen resmi yang akan diteliti.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Adapun jumlah pengurus yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung berjumlah 171 orang.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Bila populasi nya besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Maka, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel yang ditujukan kepada responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta dapat memberikan keterangan yang mengarah sehingga memperoleh data yang

¹⁶ Abdulrahman Fathoni, "Metodologi Penelitian dan teknik penyusunan skripsi", (Jakarta: Rineka Cipta), h. 38.

¹⁷ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)", CV, Alfabeta cet. Ke-7 april 2009 h. 117.

faktual.¹⁸ Keseluruhan jumlah sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 3 orang.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah tehnik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan sebuah data.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Untuk memperoleh keterangan informasi terkait dengan penelitian yang akan diteliti, peneliti menggunakan cara Tanya jawab dan bertatap muka dengan penjawab (responden). Untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Konsep Wawasan Kebangsaan menurut Pendapat Pengurus Majelis

¹⁸ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*”, Edisi Revisi V, (Jakarta: 2002, Renika Cipta), h. 109.

¹⁹ *Op,cit.*, h. 224.

Ulama Indonesia Provinsi Lampung maka, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih lengkap bila didukung oleh dokumentasi yang menghimpun data tentang situasi atau permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua sumber data diatas terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian lapangan maupun studi literature yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. *Sistemating*, melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan benturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁰

²⁰ Noer Saleh dan Musanet, "*Pedoman membuat skripsi*" (Jakarta: Gunung agung 1989), h. 12.

6. Analisa Masalah

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Metode analisa data yang dilakukan yaitu secara *Kualitatif* yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keingintahuan penelitian pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wawasan Kebangsaan

1. Sejarah Wawasan Kebangsaan

a) Era Pra Kolonial

Bangsa Indonesia bangkit melalui sejarah perjuangan masyarakat bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan materiil, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna, dan hancur tanpa sisa. Sejarah Indonesia yakni suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai dari zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa". Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit, kemudian pada masa penjajahan Belanda sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Sriwijaya sebagai suatu kerajaan maritim mengembangkan ciri khas tradisi diplomasi untuk mempertahankan perannya sebagai pusat perdagangan.²¹

²¹Sartika Inthaning Pradhani, "Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini", Lembaran Sejarah, Volume 13, Number 2, Oktober 2017, h.187.

Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu *indus* dan *nesos* yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia yang dikenal sekarang. Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti Kutai yang berdiri pada abad V di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad II.

Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal berdirinya negara Indonesia ini. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat disekitar 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dia lah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan “Sumpah Palapa” (sumpah yang berbunyi “*Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah Gurun, ring seram, tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Artinya setelah tunduk nusantara, aku akan istirahat. Setelah tunduk gurun, seram, tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku beristirahat.*”²²

²²Agus Susilo, Andriana Sofiarini, “Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusantara dibawah Majapahit Tahun 1336 M-1359 M”, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA), Volume 1, no 1, Juni 2018, h.68-69.

Sumpah Palapa yang kemudian mengilhami para *founding fathers* untuk menggali kembali, menggunakan dan memelihara visi Nusantara, bersatu dalam Wawasan Nusantara dengan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung banyak beragam, tetapi sejatinya satu, yang seharusnya berada dalam satu wadah. Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Mahapatih Gajah Mada yang kemudian setelah Majapahit berhasil menyatukan daerah-daerah di luar Jawa Dwipa menjadi Patih Dwipantara atau Nusantara, pada jamannya merupakan visi globalisasi Majapahit, yaitu meskipun pusat Kerajaan berada di Pulau Jawa (Jawa Dwipa), namun dia bertekad menyatukan seluruh wilayah Nusantara (pulau-pulau yang berada di luar pulau Jawa) dalam satu kesatuan, satu kehendak dan satu jiwa.²³

b) Masa Penjajahan

Setelah berakhirnya masa kerajaan di Indonesia masuklah bangsa Barat ke Indonesia seperti Portugis dan Spanyol yang disusul oleh Bangsa Belanda pada abad XVI tepatnya pada tahun 1596. Bangsa Belanda cukup berhasil menguasai Indonesia dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya sementara rakyat Indonesia mengalami penderitaan dimasa itu. Belanda melakukan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan memperlakukan rakyat Indonesia dengan sewenang-wenang nya tanpa memikirkan rakyat Indonesia.

²³ Soepandji, Budi Susilo, "Negara Indonesia Ialah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik", Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.

Namun perlawanan-perlawanan yang dilakukan tersebut mengalami kegagalan karena waktu itu belum terpupuk kesadaran nasional dan perjuangan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda ini terus dilakukan oleh rakyat Indonesia, secara fisik maupun politik. Munculnya kesadaran para pejuang dan golongan terpelajar Indonesia serta situasi internasional yang menimbulkan pergerakan di kalangan negara-negara terjajah, pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta berdirilah Boedi Oetomo yang didirikan oleh dr. Soetomo dan kawan-kawan dengan ketuanya Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Pada tahun 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, bertujuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, dan memperjuangkan Indonesia merdeka dan membebaskan diri dari belenggu kolonialisme yang lebih mengutamakan fanatisme kedaerahan selama tiga abad.²⁴

Sumpah Pemuda inilah yang menjadi cikal bakal pendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia yang semakin tegas memperkuat persatuan nasional sebagai bekal menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 mengandung tiga konsepsi kebangsaan sekaligus yaitu *pertama* konsepsi tentang bangsa atau *nation conception*, *kedua* konsepsi tentang wilayah atau *space conception*, dan

²⁴Sutejo K. Widodo, “ *Memaknai Sumpah Pemuda Di Era Reformasi*”, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, h.2.

ketiga konsepsi tentang budaya atau *cultural conception*. Ketiga konsepsi itu harus dipahami dan dihayati sebagai satu konsepsi yang utuh.²⁵

BPUPKI melaksanakan persidangan selama dua kali, yaitu pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli tahun 1945. Sesuai tugas yang diberikan kepada BPUPKI, penyelidikan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia ditingkatkan menjadi mempersiapkan kemerdekaan dengan cara merumuskan dasar negara sebagai landasan negara untuk negara yang akan dibentuk.²⁶

Selain perjuangan yang dilakukan dalam sidang BPUPKI, pejuang Indonesia juga tetap dilakukan melalui gerakan perlawanan di bawah tanah. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas dan melaporkannya kepada pemerintah Jepang, BPUPKI kemudian dibubarkan dan dengan usul BPUPKI dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, melalui Radio Suara Amerika, diberitakan Hiroshima dan Nagasaki dibom, dan karena kejadian ini maka Pemerintah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, tentara Inggris dengan nama *South East Asia Command* yang bertugas menduduki wilayah Indonesia, menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Inilah akhir dari masa penjajahan.

²⁵ Wahyono S.K. "*Indonesia Negara Maritim*", (Jakarta: Teraju Anggota IKAPI Cet. 2, 2009), h. 78-79.

²⁶ Notosusanto, Nugroho, "*Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*", (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 56.

c) Era Kemerdekaan

Setelah Jepang menyerah dan terjadi kekosongan kekuasaan, rakyat Indonesia yang diwakili oleh tokoh pejuang bangsa berhasil menyusun naskah Proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Naskah Proklamasi ini disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru yaitu pada tanggal 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi antara lain: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.²⁷ Proklamasi adalah momentum pembebasan dan berakhirnya penjajahan, mengantarkan rakyat Indonesia untuk memulai kehidupan bernegara, dan melanjutkan cita-cita perjuangan sebagai Negara Indonesia yang merdeka.

d) Perang Kemerdekaan

Pada tahun 1945-1959, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial. Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dengan semangatnya yang membara berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, yang diakibatkan para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Setelah pindah ke Yogyakarta, Indonesia kembali diserang oleh Belanda dan mengakibatkan Belanda yang berhasil menguasai Yogyakarta dan dijadikan ibu kota Negara Republik Indonesia dan beberapa pangkalan militer. Sidang Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia

²⁷ Lembaga Soekarno-Hatta, *“Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila”*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), h. 5.

(PDRI), dan seandainya tidak mungkin, supaya menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang pada waktu itu berada di luar negeri (New Delhi) untuk menggantikan Mr. Sjafruddin.

Berdirinya pemerintah darurat memiliki satu arti penting, yakni Indonesia masih memiliki eksistensi ketika terjadi penyerangan dan penguasaan yang dilakukan oleh Belanda. Melalui jalur militer ditandai dengan didirikannya beberapa pangkalan militer dan dilakukannya upaya perlawanan dan gerilya. Setelah selesai perundingan Roem-Royen itu, maka Yogyakarta berhasil dikembalikan, serta Soekarno-Hatta dan menteri-menteri lain yang ditawan dikembalikan ke Yogyakarta. KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah "pengakuan dan penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat. Konferensi inter-Indonesia merupakan sebuah peristiwa sejarah yang penting dalam usaha bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan.²⁸

Dalam situasi seperti ini, Moh.Natsir tampil dengan mosi yang meminta pemerintah dan seluruh elemen bangsa segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara integral. Mosi ini dikenal sebagai "Mosi Integral Natsir".Sebenarnya, selain ditandatangani oleh Natsir, mosi ini

²⁸Widhi Setyo Putro, *"Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949; Wujud Konsensus Nasional Antara Republik Indonesia Dengan Bijeenkomst Voor Federal Overleg"*, h.35.

juga ditandatangani oleh beberapa ketua fraksi di parlemen yaitu: Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch. Tauchid, Amels, dan Siradjudddin Abbas. Tidak pernah ada yang mempersoalkan bila kemudian mosi tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Mosi Integral Natsir, karena memang Natsir yang memotori dan mengonsep mosi tersebut yang selanjutnya didukung oleh fraksi-fraksi yang lain. Dalam mosi tersebut, sesungguhnya tidak ada dorongan secara eksplisit untuk membentuk negara kesatuan, bahkan Natsir sendiri mengatakan bahwa mosi tersebut tak ada kaitannya dengan permasalahan *unitarisme* (negara kesatuan) dan *federalisme* (negara federal). Yang digunakan di dalam mosi ini adalah istilah “integral” dalam arti penyelesaian secara menyeluruh dan komprehensif.²⁹

Konsep “integral” (menyeluruh dan komprehensif) atau “persatuan” (*integrasi*) memang tidak identik dengan “negara kesatuan” melainkan lebih merupakan “persatuan kehendak jiwa atau sikap batin” seluruh warga bangsa untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara. Tentang persatuan sikap batin atau kejiwaan ini, sejak awal Bung Karno sebagai *founding fathers*

²⁹ Makalah Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Natsir Mohammad - *Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia Menghadang Disintegrasi* diselenggarakan di Universitas Jendal Soedirman, Poerwokerto, 19 Juli 2008.

mengajak bangsa Indonesia untuk memahami dan menyelami konsep yang dibangun oleh Renan seorang pakar dari Prancis, yang mengatakan bahwa bangsa adalah segerombolan atau sekumpulan manusia yang memiliki solidaritas yang tinggi karena adanya kesatuan jiwa (*soul*) yang ingin bersatu dan bersama. Bangsa Indonesia juga dibangun berdasar konsep tentang bangsa dari Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan watak karena adanya persamaan nasib.³⁰

e) Gerakan 30 September

Hingga tahun 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno demi memperkuat dukungan rezimnya dan dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya namun, Para petinggi militer menentang hal ini. Pada tanggal 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada tahun

³⁰ Soepandji, Budi Susilo, "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik*", Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.

1966 mencapai setidaknya 500.000 dan yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.³¹

f) Era Orde Baru

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September tahun 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September tahun 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Pada masa Soeharto, sangat ditekankan prinsip kebangsaan dan cinta tanah air, namun prinsip tersebut telah disalah persepsikan. Semua yang menentang kebijakan pemerintah dianggap menentang bangsa dan Negara Indonesia dan dinggap sebagai pembangkang sehingga harus dilenyapkan dengan cara apapun.

³¹ Anshory, Irfan, "Asal Usul Nama Indonesia", Pikiran Rakyat, 2004-08-16.

Hanya karena kemerdekaan telah tercapai, dan kebangsaan Indonesia telah menjadi kenyataan, belakangan ini seolah-olah terasa kuno apabila kita membicarakan relevansi nasionalisme atau paham kebangsaan tersebut.

Dengan demikian, maka nasionalisme atau bahasa masa kininya pluralisme akan mampu menyediakan dirinya menjadi payung yang mengayomi keragaman kita sebagai bangsa, sekaligus menjamin kesatuan kita sebagai negara bangsa atau satu kekuatan nasional. Dengan kata lain, menjamin tegaknya Indonesia sebagai suatu rumah kebangsaan bagi beragam entitas bangsa yang berbeda-beda tapi memiliki spirit keindonesiaan yang sama.

2. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu:

- a) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.
- b) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu.
- c) Cinta akan tanah air dan bangsa.
- d) Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
- e) Kesetiakawanan sosial.

f) Masyarakat adil dan makmur.³²

Salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakan dari negara totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas karena dalam demokrasi semua dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*). Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda dan ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

3. Asas-asas Wawasan Kebangsaan

Setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya. Adapun 2 (dua) aspek tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Aspek Moral.

³² Lembaga Soekarno-Hatta, "*Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*", (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), h. 5.

Konsep wawasan kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau commitment pada seseorang atau masyarakat untuk bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa.

b) Aspek intelektual.

Konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang serta berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Bagaimana pun konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran

budaya dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan.³³

Paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu, dan berbeda dalam satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan lainnya. Dalam sejarah bangsa-bangsa terlihat betapa banyak paham yang melandaskan diri pada kebangsaan. Ada pendekatan ras atau etnik seperti Nasional-sosialisme (Nazisme) di Jerman, atas dasar agama seperti dipecahnya India dengan Pakistan, atas dasar ras dan agama seperti Israel-Yahudi, dan konsep Melayu-Islam di Malaysia, atas dasar ideologi atau atas dasar geografi atau paham geopolitik, seperti yang dikemukakan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945.³⁴ Jelaslah, bahwa wawasan kebangsaan tumbuh sesuai pengalaman yang dialami oleh seseorang, dan pengalaman merupakan akumulasi dari proses tataran sistem lainnya, yakni sub-sistem sosial, sub-sistem ekonomi, dan sub-sistem politik.³⁵ Pada tataran sub-sistem sosial berlangsung suatu proses interaksi sosial yang menghasilkan kohesi sosial yang kuat, hubungan antar individu, antar kelompok dalam masyarakat yang harmonis. Integrasi dalam sistem sosial yang terjadi akan sangat mewarnai dan mempengaruhi bagaimana sistem budaya (ideologi/falsafah/pandangan hidup) dapat bekerja dengan semestinya.

B. Wawasan Kebangsaan Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

³³ Pandangan mengenai wawasan kebangsaan ini dijelaskan secara generik oleh Ginandjar Kartasmita dalam makalahnya yang berjudul “*Pembangunan Nasional dan Wawasan Kebangsaan*” yang disampaikan pada Sarasehan Nasional Wawasan Kebangsaan di Jakarta, 9 Mei 1994.

³⁴ Hasan Basari, “*Sukarno dan perjuangan kemerdekaan*”, (Jakarta : LP3ES, 1987), h. 78.

³⁵ Parsons, Talcott. “*Toward a General Theory of action*”. New York : Harper & Row, 1951.

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam al-qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh siyasah* tersebut.

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah, ataupun pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁶ Secara terminologis, Abu Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁷ Sementara menurut Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun menurut Ibn manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

³⁶ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Edisi pertama, Prenadamedia Group”, (oktober 2014), h. 2-3.

³⁷ Abu Wahhab Khallaf, “*Al-Siyasah al-Syar’iyah*”, h. 4-5.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,³⁸ guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- a) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- b) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- c) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- d) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- e) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- f) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- g) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Adapun *fiqh siyasah* yang diambil oleh peneliti yaitu *fiqh siyasah Dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi,

³⁸Khamami Zada, "*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*", (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17.

permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luar dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi: *pertama* Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan), *kedua* Persoalan imamah, hak dan kewajiban, *ketiga* Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, *keempat* Persoalan bai'at, *kelima* Persoalan waliyul ahdi, *keenam* Persoalan perwakilan, *ketujuh* Persoalan *ahlul alli wal aqdi*, *kedelapan* Persoalan *wazarah* dan perbandingannya. Keseluruhan persoalan tersebut, dan *fiqh dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu:

- a. *Dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-quran maupun Hadist, maqasidu syariah, dan mangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁹

³⁹ H.A. Djazuli, "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah", (Jakarta: Kencana, 2003), h 47-48.

3. Wawasan Kebangsaan Dalam *Fiqh Siyasah*

Paham kebangsaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham yang menyatukan berbagai suku bangsa dan berbagai keturunan bangsa dalam wadah Kesatuan Negara Indonesia. Dalam konsep ini berarti tujuan adalah formal yaitu kesatuan dalam arti kesatuan rakyat yang menjadi warga Negara Indonesia ber-Pancasila, maka nasionalisme Indonesia disebut juga dengan nasionalisme Pancasila yaitu kebangsaan yang berdasar nilai-nilai Pancasila.⁴⁰

Wawasan kebangsaan terdapat dua kata yang harus dijelaskan tentang wawasan kebangsaan, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa wawasan berasal dari kata “mawas” yang berarti meneliti, meninjau, mengamati atau memandang. Wawasan dapat berarti juga sebagai pandangan atau tujuan. Sedangkan kebangsaan adalah ciri-ciri atau identitas yang menandai asal bangsanya, atau golongan suatu bangsa.⁴¹ Semangat wawasan kebangsaan menjadi penting untuk ditumbuh-kembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai *manifestasi* dari rasa cinta tanah air, pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan arti mahal dan bernilainya rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini.⁴²

Fajar mengemukakan bahwa hakekat dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah keutuhan Nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan nusantara dan demi kepentingan

⁴⁰Noor M Bakry, “*Orientasi Filsafat Pancasila*”, (Yogyakarta: Liberty 1994), h. 173.

⁴¹Badudu-Zain, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) h. 122.

⁴² H.A. Djazuli, “*Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2003), h 47-48.

nasional.⁴³ Menurut beberapa pendapat diatas wawasan kebangsaan adalah salah satu sikap atau sifat mengenal lebih dekat dan mempelajari bangsanya agar menimbulkan rasa nasionalisme dalam jiwa mereka. Dalam pendidikan wawasan kebangsaan harus ditanamkan kepada siswa agar siswa dapat menghargai bangsanya dan pahlawannya serta bangga akan bangsanya yaitu Indonesia.

Persatuan Islam termasuk dari *maqoshid syar'iyah* (tujuan syari'at) yang paling penting yang terkandung dalam agama ini. Ketika berbicara mengenai persatuan di dalam Al-Qur'an jelas bahwa yang dikehendaki ialah munculnya suatu kesatuan berdasarkan ikatan yang jelas dan hakiki. Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk menjadikan hal-hal primordial sebagai sebab atau ikatan jalinan yang menumbuhkan persatuan antar manusia. Allah memang menyebutkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, namun Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menjadikan faktor suku atau bangsa sebagai faktor perekat. Dalam Islam, mekanisme operasional pemerintahan negara seyogianya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara. Secara konseptual dikalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya *State, Politics, and Islam*, menekankan tiga ciri penting sebuah negara

⁴³Fajar, "*Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*".(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 52.

dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (*ummah*), hukum Islam (*syariah*), dan kepemimpinan masyarakat muslim (*khilafah*).⁴⁴

Eksistensi suku dan bangsa yang beraneka ragam di tengah pergaulan antar manusia merupakan sebuah fakta yang tak terelakkan, tetapi bukan berarti persatuan berdasarkan kesamaan suku atau bangsa merupakan persatuan yang dianjurkan apalagi diperintahkan oleh Allah maupun RasulNya. Malah sebaliknya kita temukan sebuah hadits yang mencela persatuan sekedar berdasarkan *fanatisme golongan*, baik itu golongan berdasarkan kesamaan bangsa, suku atau warna kulit. Adapun Hadits Abu Dawud yang Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Ibn ash Sarh berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Sa’id Bin Abu Ayyub dari Muhammad bin ‘Abdurahman Al Makki –Maksudnya Ibnu Abu Labibah-dari Abdullah bin Abu Sulaiman dari Jubair bin muth’im bahwa Rasulullah Shallallahu alahi wassalam bersabda: “bukan dari kami orang yang mengajak kepada golongan bukan dari kami orang yang berperang karena golongan bukan dari kami orang yang mati karena golongan).” (HR Abu Dawud 4456).*⁴⁵

Persatuan dalam Islam merupakan hal penting yang diinginkan oleh umat sehingga kita wajib berjuang untuk menyerukan, menjalankan dan merealisasikannya. Dalam Al-Quran, Allah SWT banyak menerangkan hakekat mengenai Persatuan, serta anjuran untuk menjaganya dan menghindari perpecahan yaitu terdapat didalam Q.S. Ali Imran [3]: 19 yang berbunyi:

⁴⁴Suyuti Pulungan, *“Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.5-12.

⁴⁵Abdul Majid Khon, *“Ulumul Hadits”*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.119.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَائِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٦٧﴾

*Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*⁴⁶

Maksud ayat diatas yaitu sesungguhnya semua agama dan syari'at yang didatangkan oleh para nabi, ruh atau intinya adalah Islam (menyerahkan diri), tunduk dan menurut. Meskipun dalam beberapa kewajiban dan bentuk amal agak berbeda, hal ini pulalah yang selalu diwasiatkan oleh para nabi. Orang muslim hakiki adalah orang yang bersih dari kotoran syirik, berlaku ikhlas dalam amalnya, dan disertai keimanan, tanpa memandang dari agama mana dan dalam zaman apa ia berada.⁴⁷

Allah mengancam bahwa segala bentuk persahabatan, persekutuan, koalisi, pertemanan, perkoncoan, aliansi, kemitraan akan berakibat kepada saling bermusuhan kelak di hari berbangkit, kecuali bila menjalin persahabatan yang berlandaskan taqwa kepada Allah semata. Mereka yang menjalin hubungan semata berlandaskan taqwa kepada Allah akan akrab di dunia dan tetap akrab di akhirat. Setiap jalinan di dunia ini akan menjadi permusuhan di akhirat kecuali hubungan yang terjalin karena Allah 'Azza wa jalla sebagaimana firman allah dalam Qs. Al-Zukhruf: 67 yang berbunyi :

⁴⁶ Sayid Qutub, "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an (permulaan Surah Ali-Imran 1-168)", (Depok: Gema Insani 2001), h. 22.

⁴⁷ Sayyid Quthub, "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an (Surah Ali Imran – An-Nisa 70)", (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001), h. 21.

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa." (QS Az-Zukhruf ayat 67).⁴⁸

Ibn Katsir berkata ketika menafsirkan ayat ini bahwa " setiap teman dan sahabat yang terjalin bukan karena Allah akan berubah menjadi pada hari kiamat kecuali hubungan yang terjalin karena Allah 'Azza wa Jalla maka sesungguhnya yang berhubungan tersebut akan selalu terjaga dan dipelihara". Ukhuwah adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, cinta dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang, dimana keterpautan jiwa itu ditautkan oleh ikatan akidah islam, iman, dan takwa. Perasaan bersaudara yang tulus ini akan melahirkan rasa kasih sayang yang mendalam pada jiwa setiap muslim dan mendatangkan dampak positif, seperti saling menolong, mengutamakan orang lain, ramah tamah dan mudah untuk saling memaafkan.⁴⁹

Sistem pertahanan dan keamanan Negara juga menjadi wadah bagi semua warga Negara dalam upaya mewujudkan pembelaan Negara. Dengan pertahanan dan keamanan Negara yang kuat, kita akan dapat mencegah dan menangkal berbagai ancaman, gangguan, dan serangan baik fisik maupun nonfisik yang dapat membahayakan Bangsa dan Negara kita. Bertolak dari pandangan tersebut, bangsa Indonesia mengupayakan terwujudnya sistem pertahanan dan keamanan Negara yang tangguh. Bangsa kita berusaha untuk

⁴⁸Qs. Al-Zhukruf ayat 69.

⁴⁹Hasan el-Bugisy, "Gaul dengan Al-Qur'an (pesan-pesan indah Al-Qur'an yang dahsyat untuk kamu yang muda), h. 104-105.

tidak mengalami kembali penjajahan dari bangsa lain dan meningkatkan kehidupan bangsa pada masa ini dan masa depan serta disisi lain juga turut aktif menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Karena itu, terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan Negara, bangsa Indonesia sendiri menerapkan prinsip-prinsip sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Namun, Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa kedalam suasana adil dalam kemakmuran, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas.

Dengan kata lain, yang penting adalah bagaimana pemerintah itu mengantarakan rakyatnya menuju *baldah tayyibah wa rabbun gafur* adapun bentuk dan sistem pemerintahannya diserahkan sepenuhnya kepada kreativitas manusia sesuai dengan tuntutan kondisi sosio-kultural masing-masing bangsa sebab tidak ada bentuk spesifik tentang sistem pemerintahan nya yang secara tegas dinyatakan didalam Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi, hal itu bukan berarti islam tidak memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut yakni prinsip tauhid, *asy-syura*, *al-adalah*, *al-hurriyyah ma'a mas'uliyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminan *haq al-ibad (HAM)* dan sebagainya.⁵⁰ Apa yang disebut sebagai politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan antara agama dan politik. Sehingga dalam gerakan Islam modern, islam sering kali dinyatakan oleh sebagian pakar sebagai *al-din wa al- dawlah* (agama dan negara). Memang banyak cendekiawan muslim

⁵⁰Abdul Mustaqim, "*Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (sebuah Transformasi Makna Jihad)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta", Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, h.116-117.

yang sepakat dengan ide tersebut seperti *Hasan al-Banna*, *Sayyid Quth*, *Muhammad Rasyid Rida*, *Abu al-A'la al-Maududi* yang menyatakan bahwa islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan islam tidak mengenal sistem kependetaan (*rahbaniyyah*) atau kelembagaan “gereja”.

C. Wawasan Kebangsaan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Landasan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai Warga Negara Indonesia tentu saja kita harus mengetahui bahwa negara kita Indonesia ini bisa berdiri sampai sekarang karena ada instrumen-instrumen hukum yang menopangnya. Hukum yang diciptakan di dunia ini membuat setiap warga bisa selaras dalam kehidupan sehingga bisa tercipta negara yang utuh dan baik. Kita yang tinggal di NKRI dan berkedudukan sebagai WNI harus mengetahui jika ternyata hukum itu memiliki dasar. Mulai dari sekarang sebaiknya kita mengetahui dasar hukum NKRI sehingga tidak hanya menaati peraturan dan hukum yang ada namun kita juga menjadi tahu bagaimana asal muasal yang ada itu dibentuk. Sehingga sebagai warga kita bisa menjadi warga yang bijaksana dalam membangun kehidupan berkebangsaan.⁵¹ Adapun Landasan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Pancasila

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan atau dasar

⁵¹ Notosusanto, Nugroho, “*Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*”, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 56.

hukum yang ideal atau yang utama dari NKRI sendiri terwujud di dalam Pancasila. Untuk menjadi dasar atau pengikat hukum yang ada di NKRI ini tentu saja membutuhkan sesuatu hal yang dianggap kuat dan bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Oleh karena itu digunakanlah Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Salah satunya ada pada sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang menjadi salah satu dasar hukum yang ideal bagi NKRI kita. Pancasila sebagai Dasar negara ditegaskan lagi dengan adanya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam ketetapan itu dijelaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara. Fungsi Pancasila yaitu antara lain sebagai Ideologi Negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesai, Pancasila sebagai pandangan Hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa.⁵²

b. Pembukaan UUD 1945

Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai Landasan Hukum Demokrasi Pancasila sehingga kita lebih paham mengenai pembukaan UUD 1945. Dasar hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri adalah nilai-nilai dari Pancasila yang tersirat di dalam

⁵² Ronto, “*Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*”, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero, 2012), h.11-15.

pembukaan UUD 1945. Kedudukan Pancasila yang ada pada pembukaan UUD 1945 itu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia dan termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II no.7 itu artinya penetapan UUD 1945 sebagai dasar hukum sudahlah pasti dan sudah dapat dipastikan jika pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu sumber hukum yang positif di Indonesia.

Dengan dijadikannya UUD 1945 sebagai dasar hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia artinya setiap kali pihak berwenang atau pemerintah ingin membuat sebuah hukum atau peraturan maka harus bersumber atau melihat pembukaan UUD 1945 sebagai patokan. Hal ini bisa terjadi karena di dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri memang ada terkandung dasar filsafat Indonesia. Namun ada beberapa perubahan seperti misalnya amandemen di dalam UUD 1945. Walau mungkin terjadi beberapa pergantian amandemen di UUD 1945 tetap saja dasar hukum Indonesia tetap dipusatkan kepada pembukaan UUD 1945, hanya saja mungkin amandemen yang ada berpengaruh kepada lembaga-lembaga negara dan juga kedaulatan rakyat.

b. Pasal-Pasal di dalam UUD 1945

Yang bisa menjadi dasar hukum dari negara Indonesia yang ketiga adalah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-Pasal yang ada di dalam UUD itu dibuat sesuai dengan Pancasila dan kepribadian negara Indonesia. Oleh karena itu UUD 1945 dijadikan sebagai dasar hukum di Indonesia. Penjabaran mengenai filsafat hukum

Indonesia ini terkandung dalam penjelasan pada pembukaan UUD 1945 dimana dikatakan "Undang-Undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal". Sehingga jika pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai filsafat dasar hukum negara maka batang tubuh dan penjelasan di atas merupakan teorinya. Oleh karena itu pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 juga menjadi dasar hukum yang positif.

2. Tujuan Bernegara Dalam Perspektif UUD 1945 dan Pancasila

Negara adalah tempat yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang pengaturan dan aktivitas pembangunan, ekonomi, transportasi, perdagangan, politik, dan lain sebagainya. Sebuah tempat atau wilayah dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu apabila terdapat wilayah, rakyat, serta pemerintahan. Sama halnya dengan pemerintahan, sebuah negara juga memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta menyejahterakan warga negaranya. Secara alamiah, manusia sebagai makhluk social sejak dahulu selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan melanjutkan keturunan. Kemudian mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu dan memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berternak dan

bercocok tanam. Pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan menunjukkan bahwa keberadaan Negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Dalam pengertian ini Negara merupakan kesatuan social yang diatur secara Konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.⁵³

Tujuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara republik, Indonesia memiliki banyak kewajiban kepada rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi, “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

⁵³Made Warka, “*Wawasan Kebangsaan Dalam NKRI*”, h. 10-11.

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
 Dari UUD 1945 Pasal 31 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat mengenai pendidikan serta kebudayaan.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi di komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)”* yang disusun oleh Suwantinah jurusan Siyasah Fakultas Syariah tahun 2017. Dalam partisipasi pelaksanaan bela Negara berkaitan dengan peran serta seorang warganegara dalam memberikan kontribusinya untuk keperluan bela Negara yang dilandasi jiwa kecintaanya kepada tanah air Indonesia demi bagsa dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Persamaan Antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan, tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih terfokus kepada wawasan kebangsaannya yang ditinjau dari fiqh siyasah.⁵⁴

⁵⁴Suwantinah jurusan Siyasah Fakultas Syariah *“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi di komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)”*, tahun 2017.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila” yang disusun oleh Dea Fanny Utari Jurusan Siyasah Fakultas Syariah tahun 2017. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa konsep negara hukum Pancasila itu memiliki unsur-unsur atau prinsip bernegara antara lain: adanya supremasi hukum, adanya pemerintah berdasarkan hukum, demokrasi, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan hakim yang bebas tanpa intervensi, adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah, hukum bertujuan untuk mensejahterakan dan keadilan sosial warga masyarakat. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam membahas Pancasila penulis memasukan sedikit pembahasan tentang Pancasila sebagai landasan hukum atau dasar hukum. dalam melakukan penelitian penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan penelitian lapangan, tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih terfokus kepada bagaimana wawasan kebangsaan menurut PWNU dan MUI Provinsi lampung dan terfokus kepada wawasan kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dilihat dari fiqh siyasah.⁵⁵

⁵⁵Dea Fanny Utari, “*Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila*”, tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Abu Wahhab Khallaf, “Al-Siyasah al-Syar’iyah”.

Hasan el-Bugisy, “*Gaul dengan Al-Qur'an (pesan-pesan indah Al-Qur'an yang dahsyat untuk kamu yang muda)*”

Sayid Qutub, “*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an (permulaan Surah Ali-Imran 1-168)*”, (Depok: Gema Insani 2001)

Sayyid Quthub, “*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an (Surah Ali Imran – An-Nisa 70)*”, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001)

Hadits

Abdul Majid Khon, “*Ulumul Hadits*”, (Jakarta: Amzah, 2009).

Fiqh

Suyuti Pulungan, “*Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002)

Iqbal Muhammad, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta: Prenademia Group, 2014).

Sudirman, “*Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, cet. 1 2008)

Sudarto, “*Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*”, (Yogyakarta: cet.1, CV Budi Utama, 2018)

Buku

Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” Edisi Revisi V, (Jakarta: Renika Cipta).

Asnawati, “*Mereka membicarakan wawasan kebangsaan*”, Puslitbang kehidupan keagamaan Badan litbang dan diklat kementerian Agama RI Jl. M. H. Thamrin no. 6 (Jakarta 10340).

Aziz Abdul Aceng Dy, dkk, *“Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah Di Indonesia: Sejarah Pemikiran, dan Dinamika Nahdatul Ulama”*, (Jakarta: Pustaka Ma’arif NU, 2007).

Badudu-Zain, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

Bennedict Anderson, *“Imagined Community: reflections on the Origin and Sprer of Nationalism”*, London: Verso, 1991.

Dea Fanny Utari, *“Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila”*, tahun 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Hasan Basari, *“Sukarno dan perjuangan kemerdekaan”*, (Jakarta : LP3ES, 1987).

Hasan, Muhammad, Tholhah, *“Ahlusunnah Wal Jama’ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU”* Lantabora Press-Jakarta Indonesia, Cet. Ke-7 ramadhan 1426 H/10 oktober 2015 M.

Ismail SM, *“Strategi Pembelajaran Agama Islam berbasis Paikem”*, (Semarang: Resail Media Group 2009).

Khamami Zada, *“Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya Untuk Umat

Lembaga Soekarno-Hatta, *“Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila”*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984)

Made Warka, *“Wawasan Kebangsaan Dalam NKRI”*.

Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, Edisi pertama, Prenadamedia Group”, (oktober 2014).

Musanet, dan Noer Saleh, *“Pedoman membuat skripsi”* (Jakarta: Gunung agung 1989)

Moch, H. Kharismullah Hilmatiar, *“Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949 dalam Perspektf Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara”*, Pemerhati Masalah Politik, Garut Jawa Barat.

Nasir, M “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Notosusanto, Nugroho, “*Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*”, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985)

Noor M Bakry,”*Orientasi Filsafat Pancasila*”, (Yogyakarta: Liberty 1994).

Suwantinah jurusan Siyasah Fakultas Syariah “*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi di komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)*”, tahun 2017.

Rianawati, “*Implementasi Nilai-nilai Karakter Pada Mata Pelajaran*”.

Widhi Setyo Putro, “*Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949; Wujud Konsensus Nasional Antara Republik Indonesia Dengan Bijeenkomst Voor Federal Overleg*”

Jurnal

Abdul Mustaqim, “*Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an (sebu Transformasi Makna Jihad)*”, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011

Agus Susilo, Andriana Sofiarini, “*Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusantara dibawah Majapahit Tahun 1336 M-1359 M*”, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA), Volume 1, no 1, Juni 2018, h.68-69.

Anand Krishna, “*Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal dan Semangat Kebangsaan*”, *Jurnal Edukasi Mencintai Indonesia Edisi Seabad Kebangkitan Nasional*, (Semarang: Edukasi Volume V, 2008).

Anshory, Irfan, “*Asal Usul Nama Indonesia*”, Pikiran Rakyat, 2004-08-16

Makalah Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Natsir Mohammad - *Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia Menghadang Disintegrasi* diselenggarakan di Universitas Jendal Soedirman, Poerwokerto, 19 Juli 2008.

Pandangan mengenai wawasan kebangsaan ini dijelaskan secara generic oleh Ginandjar Kartasasmita dalam makalahnya yang berjudul “*Pembangunan Nasional dan Wawasan Kebangasn*” yang disampaikan pada Sarasehan Nasional Wawasan Kebangsaan di Jakarta, 9 Mei 1994.

Soepandji, Budi Susilo, “*Negara Indonesia Ialah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik*”, Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.

Wahyono S.K. “*Indonesia Negara Maritim*”, (Jakarta: Teraju Anggota IKAPI Cet. 2, 2009)

Wawancara

H. Suryani M. Nur, S.Sos., MM, tanggal 27 November 2019, Jam 13.53- 14.’ WIB.

Drs. KH. Basyaruddin Maisir AM tanggal 02 Desember 2019, jam 09.09- 09. 21 WIB.

Dr. H. Rosidi MA, tanggal 03 Desember 2019, jam 10.04- 10.41 WIB.

Sumber On-Line

<http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/>, diakses Tanggal 18 September 2019.

<https://duajurai.co/2016/05/23/pemprov-lampung-gelar-seminar-dan-lokakarya-wawasan-kebangsaan-di-balai-keratun>, diakses pada hari kamis tanggal 22 agustus 2019 jam 14.19 WIB.

<https://mui-lampung.or.id/2017/10/24/ldii-tanjung-senang-gelar-lokakarya-wawasan-kebangsaan-dan-bela-negara/>, diakses pada 20 agustus 2019 20.32 WIB.

<https://wong-cirbon-.blogspot.com>, diakses pada tanggal 20 agustus 2019 pada jam 20.12 WIB.

Latif Abdul, “*Organisasi-Organisasi Islam di Indonesia*”, (on-line), tersedia di <https://id.scribd.com>>dokumen (diakses pada 20 agustus 2019 pada 10.35 WIB).

<https://fajarsumatera.co.id/mui-lampung-gelar-akademi-dai-wasathiyah>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019, jam 9.38 WIB.